

BULETIN EDISI PEKAN KEEMPAT FEBRUARI 2026

# KEMENKUM KALSEL NEWS

BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM ✳️ DIVISI PELAYANAN HUKUM ✳️ DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM



## Kakanwil Kemenkum Kalsel Lantik Dua Analisis SDM Aparatur, Perkuat Tata Kelola Berbasis Sistem Merit



Posbankum Desa/Kelurahan Siap Diresmikan Presiden, Kanwil Kalsel Ikuti Rapat Nasional



Verifikasi Lapangan Diperkuat, Pendaftaran IG Kopi Liberika Tapin Kian Matang Bersama Kemenkum Kalsel

Kunjungi laman kami



Terhubung lebih dekat:

YouTube Facebook Instagram X KEMENKUMKALSEL

**KEMENKUM KALSEL**

#LayananHukumMakinMudah

## Bantuan Teknis IG Kopi Liberika Tapin, Percepat Penguatan Identitas Produk Unggulan Daerah



Tapin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Tim Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan kegiatan Bantuan Teknis Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat di Kabupaten Tapin, Senin (23/02/2026). Kegiatan hari pertama ini berlangsung di Gedung Bappelitbang Kabupaten Tapin sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perlindungan dan penguatan produk unggulan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Tim Indikasi Geografis dari DJKI, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Tapin beserta jajaran, serta Tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong percepatan pendaftaran Indikasi Geografis di Kabupaten Tapin.

Dalam pelaksanaannya, tim memberikan pendampingan teknis terkait penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis, kelengkapan data pendukung, hingga pemetaan potensi wilayah untuk memperkuat karakteristik khas Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat. Diskusi teknis juga difokuskan pada substansi dokumen, standar mutu, serta strategi percepatan proses pendaftaran.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa perlindungan melalui Indikasi Geografis bukan hanya soal legalitas, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

"Indikasi Geografis merupakan instrumen penting untuk menjaga reputasi dan kualitas produk unggulan daerah. Melalui pendampingan ini, kami berharap Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat segera memperoleh perlindungan hukum sehingga memiliki nilai tambah, daya saing, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Tapin," ujar Meidy.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, tim teknis, dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan dokumen IG tersusun secara komprehensif dan memenuhi persyaratan substantif.

Kegiatan bantuan teknis ini akan berlanjut dengan penyempurnaan dokumen serta koordinasi lanjutan guna memastikan proses pendaftaran berjalan optimal hingga terbitnya sertifikat Indikasi Geografis.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan Kopi Liberika dari wilayah Hatungun dan Lokpaikat semakin dikenal luas sebagai produk khas Kabupaten Tapin yang memiliki karakter unik dan kualitas unggul, sekaligus memperkuat identitas daerah di tingkat nasional.



## Kakanwil Kemenkum Kalsel Lantik Dua Analis SDM Aparatur, Perkuat Tata Kelola Berbasis Sistem Merit



Banjarmasin, Humas\_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, secara langsung mengambil sumpah dan melantik dua Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Senin (23/02/2026).

Adapun pejabat yang dilantik yakni merupakan kenaikan jenjang jabatan atas nama Ika Yeyen Lestari sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Muda dan perpindahan dari jabatan lain atas nama Yansurullah sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Pertama. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut turut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial dan non manajerial, rohaniawan, serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa pelantikan ini memiliki makna strategis bagi penguatan tata kelola organisasi. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, menurutnya, bukan sekadar jabatan teknis administratif, melainkan tulang punggung dalam pengelolaan manajemen kepegawaian yang profesional, modern, dan berbasis sistem merit.

“Sebagai bagian dari Kementerian Hukum, kita sedang berada dalam fase transformasi birokrasi yang menekankan efektivitas organisasi, simplifikasi proses bisnis, serta digitalisasi layanan kepegawaian. Oleh karena itu, jabatan yang Saudara/i emban memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap kebijakan SDM disusun berdasarkan data yang valid, analisis yang baik, dan perencanaan yang terukur,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, Analis SDM Aparatur akan berhadapan dengan data strategis terkait perencanaan formasi, promosi, mutasi, dan pengembangan pegawai, sehingga setiap analisis harus dilakukan secara objektif, transparan, serta bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

Selain itu, Alex mendorong para pejabat yang dilantik untuk terus memperkuat kompetensi dan kapasitas diri, proaktif mengikuti perkembangan regulasi di bidang kepegawaian, serta menguasai sistem informasi kepegawaian berbasis digital. Kolaborasi yang harmonis antarunit kerja juga dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif.

“Setiap analisis yang dilakukan harus bermuara pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Prinsip the right man on the right place harus benar-benar terwujud di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia berharap, kehadiran Analis SDM Aparatur yang baru dilantik dapat semakin memperkuat tata kelola organisasi, khususnya dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, penyalarsan struktur organisasi, serta optimalisasi beban kerja.

Mengakhiri sambutannya, Alex Cosmas Pinem menyampaikan ucapan selamat kepada Ika Yeyen Lestari dan Yansurullah atas amanah yang diberikan, seraya mengajak keduanya untuk menjadikan jabatan tersebut sebagai ladang pengabdian dan kontribusi terbaik bagi organisasi, bangsa, dan negara.



## Posbankum Desa/Kelurahan Siap Diresmikan Presiden, Kanwil Kalsel Ikuti Rapat Nasional



Banjarmasin, Humas\_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, mengikuti Rapat Persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan oleh Presiden Republik Indonesia secara daring di Ruang Rapat Kakanwil, Senin (23/2/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut undangan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka persiapan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan yang dijadwalkan akan dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 April 2026.

Kegiatan dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum, Yadi Hendriana, serta dihadiri Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usiher, dan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, beserta jajaran.

Dalam agenda rapat disampaikan arahan dari Staf Khusus Menteri dan Kepala BPHN terkait kesiapan teknis maupun substansi pelaksanaan peresmian secara nasional. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan teknis mengenai pembinaan serta mekanisme pelaporan layanan Posbankum guna memastikan standar pelayanan berjalan optimal dan seragam di seluruh wilayah.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan melalui penguatan layanan Posbankum. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan peresmian nasional pada April mendatang dapat berjalan lancar serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Perkuat Koordinasi Bersama Biro Keuangan Bahas Kesiapan Gedung Kantor Wilayah Baru



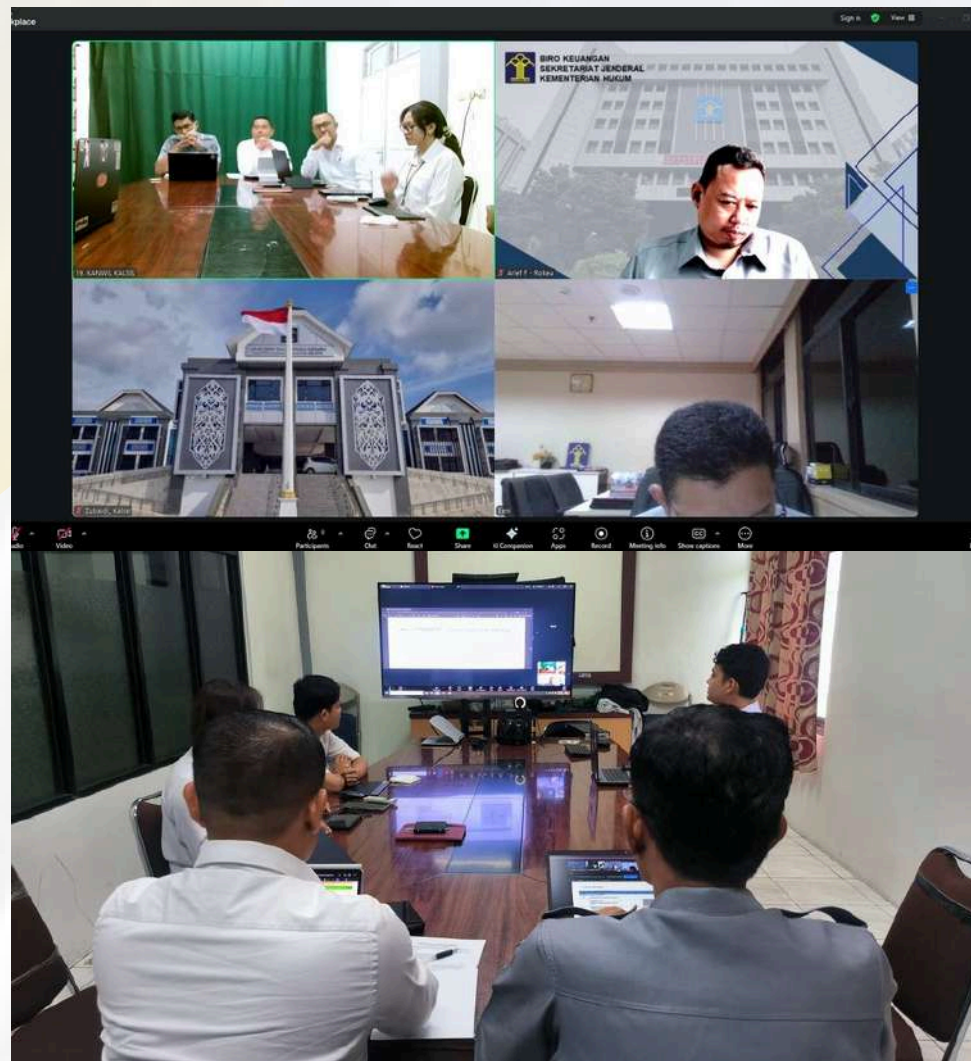
Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Keuangan dan PPK Kantor Wilayah melaksanakan diskusi bersama tim dari Biro Keuangan Kementerian Hukum terkait rencana lanjutan penyempurnaan dan kesiapan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang baru pada Senin (23/02).

Kegiatan diskusi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor guna memastikan pembangunan gedung baru dapat berjalan sesuai ketentuan dan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, pembahasan juga mencakup optimalisasi penggunaan anggaran agar pembangunan gedung dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui diskusi ini diharapkan dapat terwujud kesamaan pemahaman antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dan Biro Keuangan Kementerian Hukum terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung pembangunan gedung kantor wilayah yang representatif dan mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kegiatan koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan pembangunan yang matang, transparan, dan berkelanjutan.



## Kasel Didorong Daftarkan Indikasi Geografis Kopi Pertama, DJKI Hadirkan Ahli Kopi Nasional



Banjarmasin, Humas\_Info – Kalimantan Selatan didorong untuk segera mencatatkan sejarah baru melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG) kopi pertama di provinsi ini. Dua potensi unggulan, yakni Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat dari Kabupaten Tapin, menjadi fokus utama dalam upaya tersebut.

Dorongan ini ditandai dengan kehadiran tim dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum yang berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pada Senin (23/02/2026). Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem beserta jajaran sebagai bentuk komitmen bersama dalam pemajuan potensi kekayaan intelektual daerah.

Kunjungan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tapin ini bertujuan untuk membantu penyempurnaan dokumen deskripsi sebagai syarat utama pengajuan permohonan IG.

Fokus kegiatan diarahkan pada pendampingan penyusunan dokumen deskripsi yang memuat karakteristik, kualitas, hingga keterkaitan produk dengan faktor geografis setempat. Dokumen ini menjadi fondasi penting dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis.

Turut hadir dalam tim pendampingan Muhammad Romadhon selaku Pemeriksa Merek Pertama, Yunik Hendra Wati selaku Arsiparis Perama, dan Djoko Soemarmo ahli kopi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Jember. Kehadiran tim DJKI dan pakar kopi nasional tersebut diharapkan dapat memperkuat substansi ilmiah dan teknis dalam penyusunan dokumen, khususnya terkait profil cita rasa, karakter morfologi tanaman, hingga sistem budidaya Kopi Liberika di wilayah Hatungun dan Lokpaikat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa pendaftaran IG ini bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah, perlindungan hukum, dan daya saing kopi lokal di pasar nasional maupun internasional.

"Indikasi Geografis akan menjadi identitas resmi yang menegaskan bahwa Kopi Liberika Hatungun dan Lokpaikat memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki daerah lain. Ini momentum bagi Kalimantan Selatan untuk memiliki IG kopi pertamanya," ungkapnya.

Dengan sinergi antara DJKI, Kanwil Kemenkum Kasel, pemerintah daerah, serta dukungan ahli dari Puslitkoka, diharapkan Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat dapat segera diajukan dan ditetapkan sebagai Indikasi Geografis pertama untuk komoditas kopi di Kalimantan Selatan serta dapat membuka babak baru kebangkitan kopi Banua di kancah nasional.



## Perkuat Sistem Pembentukan Regulasi, Kanwil Kalsel Ikuti Diskusi UU P3



Banjarmasin, Humas\_Info – Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Diskusi Substansi Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) serta percepatan pengisian survei secara daring di Ruang Rapat Kakanwil, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai bagian dari pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, serta kemanfaatan UU P3 bagi sistem hukum nasional.

Dalam paparannya disampaikan bahwa pemantauan dan peninjauan merupakan amanat Pasal 95A UU 13 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa pelaksanaannya oleh Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Diskusi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai responden survei. Survei tersebut memuat 18 pertanyaan dengan pilihan jawaban skala sikap serta permintaan enam masukan atau rekomendasi, yang mencakup aspek perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang standar, terpadu, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Keikutsertaan aktif Tim Kanwil Kemenkum Kalsel menjadi wujud komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pembentukan regulasi di tingkat nasional maupun daerah.



## Jaga Profesionalitas Jabatan Notaris, MPDN Banjarmasin Gelar Pleno Hasil Pemeriksaan



Banjarmasin, Humas\_Info – Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banjarmasin menggelar Rapat Pleno pada Selasa (24/02/2026) bertempat di Ruang BerAkhlak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua MPDN Banjarmasin, Eryck Yulianto dan dihadiri oleh jajaran pengurus.

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta menindaklanjuti telah berakhirnya pemeriksaan protokol notaris termin pertama.

Dalam pleno tersebut, MPDN Kota Banjarmasin membahas hasil pemeriksaan protokol notaris termin pertama. Sebanyak 18 notaris telah menjalani pemeriksaan administrasi dan kelengkapan protokol sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di wilayah Kota Banjarmasin.

Rapat pleno ini dilaksanakan sebagai forum resmi untuk merumuskan dan menetapkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kalimantan Selatan sebagai dasar tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain membahas hasil termin pertama, rapat juga menyepakati jadwal pemeriksaan lanjutan bagi notaris yang belum diperiksa. Sebanyak 95 notaris dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang.



Melalui pleno ini, MPDN Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam memastikan tertib administrasi dan kepatuhan notaris terhadap ketentuan jabatan, guna menjaga profesionalitas serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Perkuat Kualitas Layanan, BSK Konsultasi ke BPS Soal Survei Kepuasan dan ISO 9001:2015



Banjar, BSK\_Info – Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan konsultasi Program Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar pada 23–24 Februari 2026.

Kegiatan yang berlangsung di kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Banjar tersebut difokuskan pada diskusi pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP), sekaligus pembelajaran penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai standar layanan yang terintegrasi secara nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Tim BSK Kanwil Kemenkum Kalsel memperoleh pemaparan terkait implementasi sertifikasi ISO 9001:2015 di lingkungan BPS, mulai dari penentuan layanan yang akan disertifikasi, penggunaan jasa konsultan ISO, pemeriksaan dokumen, tahapan audit atau wawancara implementasi, hingga pemenuhan klausul standar mutu. Disampaikan pula bahwa sertifikasi ISO 9001:2015 wajib dilakukan resertifikasi setiap tahun, dengan masa berlaku sertifikat selama tiga tahun.

Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan, Eldy Prasetya Setiawan, menyampaikan bahwa konsultasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola layanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Melalui konsultasi ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan SPAK-SPKP tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar selaras dengan prinsip manajemen mutu dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Penerapan ISO 9001:2015 menjadi referensi penting dalam membangun sistem pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan,” ujar Eldy.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan sistem manajemen mutu juga memiliki relevansi langsung dengan pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai forum berbagi praktik (sharing session) terkait pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang direncanakan akan diselenggarakan Kanwil Kemenkum Kalsel. FKK nantinya menjadi wadah dialog dan penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pakar/ahli, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, hingga media, dalam rangka evaluasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan Kementerian Hukum di wilayah.

Sebagai tindak lanjut, Tim BSK akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan SPAK-SPKP agar semakin terintegrasi dengan prinsip manajemen mutu, menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan, serta meneruskan dokumentasi kegiatan kepada Tim Humas sebagai bahan publikasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Lanjutkan Bantuan Teknis Pendaftaran IG Kopi Liberika Hatungun dan Lokpaikat di Tapin



Tapin, KI\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melanjutkan kegiatan Bantuan Teknis Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat di Kabupaten Tapin pada hari kedua, Selasa (24/2/2026), bertempat di Kantor Bupati Tapin.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pendampingan sebelumnya yang dilakukan bersama Tim Ahli Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Audiensi dan pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tapin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tapin, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin, Tim Ahli Indikasi Geografis DJKI, serta Tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Tapin menyambut baik kehadiran Tim Kanwil Kemenkum Kalsel dan Tim DJKI serta menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat sebagai produk unggulan daerah yang memiliki potensi ekonomi dan daya saing.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa kehadiran tim bertujuan memberikan bantuan teknis dan pendampingan secara komprehensif kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam proses pemenuhan persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis, baik dari aspek administratif maupun substansi dokumen deskripsi produk.

Sementara itu, Tim Ahli Indikasi Geografis DJKI yang dipimpin oleh Djoko Soemarno memaparkan hasil pengamatan terhadap karakteristik Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil tersebut, kopi liberika asal Tapin dinilai memiliki karakteristik dan kekhasan yang berpotensi kuat untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta menjadi salah satu komoditas kopi unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Melalui pendampingan ini, diharapkan proses pendaftaran Indikasi Geografis dapat berjalan lancar dan memberikan perlindungan hukum terhadap produk lokal, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Tapin.



## Verifikasi Lapangan Diperkuat, Pendaftaran IG Kopi Liberika Tapin Kian Matang Bersama Kemenkum Kalsel



Tapin, KI\_Info – Komitmen dalam mendorong perlindungan dan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah kembali ditegaskan melalui kegiatan Bantuan Teknis Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat di Kabupaten Tapin, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenkum Kalsel ini memasuki hari kedua dengan agenda verifikasi lapangan di Desa Lokpaikat dan Desa Hatungun bersama Tim Ahli Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen deskripsi Indikasi Geografis dengan kondisi riil di lapangan.

Tim melakukan pengamatan langsung terhadap karakteristik Kopi Liberika yang menjadi ciri khas wilayah tersebut, mulai dari jenis tanaman, metode budidaya, kondisi lahan, hingga proses penanaman dan pengelolaan oleh para petani. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memperkuat substansi dokumen IG agar memenuhi persyaratan perlindungan hukum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa verifikasi lapangan merupakan langkah krusial dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis.

“Kami memastikan bahwa karakteristik khas Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat benar-benar memiliki keterkaitan erat dengan faktor geografis wilayahnya. Kesesuaian antara dokumen dan kondisi faktual di lapangan menjadi kunci dalam proses pendaftaran IG,” ujarnya.

la menambahkan, perlindungan melalui Indikasi Geografis tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing produk dan kesejahteraan petani.

“Dengan terdaptarnya IG, kopi Liberika dari Tapin akan memiliki identitas dan pengakuan yang lebih kuat, sehingga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi serta membuka peluang pasar yang lebih luas,” tambah Meidy.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Litbang Bappelitbang Kabupaten Tapin, Camat Hatungun, Tim Layanan Kekayaan Intelektual, serta masyarakat dan para petani kopi di kedua desa. Pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat menyambut positif pendampingan yang diberikan dan berharap proses pendaftaran dapat berjalan lancar hingga tahap sertifikasi.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat segera memperoleh perlindungan Indikasi Geografis sebagai produk khas Kabupaten Tapin yang membanggakan.



## Musik Religi Ramadan, DJKI Ingatkan Royalti Hak Cipta



JAKARTA – Memasuki bulan suci Ramadan, lagu-lagu religi kembali menggema di berbagai pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan kafe sebagai pengiring aktivitas masyarakat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengingatkan bahwa setiap pemutaran lagu untuk kepentingan komersial di ruang publik wajib menghormati hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJKI mengakui fenomena tahunan ini turut mendorong pertumbuhan musik religi di Indonesia. Karya-karya dari musisi seperti Opick, Bimbo, hingga Maher Zain kerap menjadi pilihan untuk membangun suasana teduh menjelang waktu berbuka puasa. Kehadiran musik religi telah menjadi bagian yang melekat dalam tradisi Ramadhan di ruang-ruang komersial. Oleh sebab itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, menegaskan bahwa penggunaan lagu religi di area komersial memiliki konsekuensi hukum.

"Kami mengimbau para pelaku usaha, mulai dari pusat perbelanjaan, hotel, hingga platform digital untuk memastikan bahwa pemutaran lagu religi dilakukan dengan menghormati hak ekonomi para pencipta. Ini merupakan bentuk apresiasi bagi musisi yang telah berkarya," ujarnya pada 24 Februari 2026 di Kantor DJKI, Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, setiap penggunaan lagu secara komersial di layanan publik dikategorikan sebagai pertunjukan publik (public performance) yang mewajibkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

"Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha karena menggunakan skema satu pintu, sehingga pengguna musik tidak perlu menghubungi masing-masing pencipta secara terpisah," lanjutnya.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pelaku usaha dapat mengakses situs resmi LMKN dan memilih kategori lisensi sesuai jenis usahanya. Selanjutnya, pelaku usaha mengisi formulir permohonan lisensi dengan melengkapi data usaha serta rencana penggunaan musik. Setelah proses verifikasi, LMKN akan menerbitkan proforma invoice sebagai dasar pembayaran royalti.

Setelah pembayaran dilakukan, pelaku usaha akan memperoleh sertifikat lisensi sebagai bukti sah pemanfaatan lagu secara komersial. DJKI juga mendorong pelaku usaha menyusun dan menyimpan daftar lagu (log sheet) yang diputar guna mendukung distribusi royalti yang akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada pencipta yang berhak.

DJKI mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjadikan momentum Ramadhan sebagai kesempatan memperkuat kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual. Dengan menghargai dan memenuhi kewajiban royalti secara benar, pelaku usaha turut menjaga keberlanjutan industri musik nasional serta memastikan para kreator terus memperoleh imbalan yang adil atas karya yang menghidupkan suasana bulan suci.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem mengharapkan pelaku usaha telah memiliki kesadaran atas kewajiban dalam pembayaran royalti.

"Momentum Ramadhan yang identik dengan pemutaran lagu-lagu religi di ruang publik harus diiringi dengan kesadaran hukum para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Penghormatan terhadap hak cipta bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk apresiasi nyata kepada para musisi dan pencipta yang karyanya menghidupkan suasana bulan suci. Di wilayah, kami terus mendorong sosialisasi dan pendampingan agar pemanfaatan lagu secara komersial berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian serta keadilan bagi para kreator," ungkapnya.

## Perkuat Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Kanwil Kemenkum Kalsel Harmonisasi Ranperbup Muatan Lokal HST



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat, bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Rabu (25/2/2026).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, beserta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Anhar, Kepala Bagian Hukum Setda HST, Herlinda, beserta jajaran.

Kegiatan harmonisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna memastikan kesesuaian substansi, sistematika, dan teknik penyusunan rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan regulasi ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur secara komprehensif mengenai maksud, tujuan, prinsip, serta ruang lingkup Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan sesuai karakteristik daerah.

Kurikulum Muatan Lokal bertujuan melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, mengenalkan lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual kepada peserta didik, serta memperkuat pendidikan karakter melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga.

Adapun materi muatan lokal yang diatur meliputi Pendidikan Adab dan Sopan Santun, Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, Bahasa Banjar, Tahfidz, Pendidikan Anti Korupsi, Kuliner Daerah, Seni dan Budaya Daerah, Pendidikan Anti Narkoba, Gaya Hidup Berkelanjutan, Literasi Keuangan, hingga English Skill Boost. Selain itu, diatur pula pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat daerah dan satuan pendidikan, kerangka kurikulum, perencanaan dan penetapan, hingga mekanisme pelaksanaan dan evaluasi.



Melalui rapat harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mendukung terwujudnya generasi yang berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing.

## Kadiv P3H Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Ranperbup Kurikulum Muatan Lokal HST



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan penyerahan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat, bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Rabu (25/2/2026).

Penyerahan hasil harmonisasi dilakukan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Anhar, serta Kepala Bagian Hukum Setda HST, Herlinda, disaksikan oleh jajaran.

Penyerahan ini merupakan bagian akhir dari proses fasilitasi harmonisasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel guna memastikan rancangan peraturan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa Kurikulum Muatan Lokal dirancang untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, mengenalkan lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual kepada peserta didik, serta memperkuat pendidikan karakter melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga.

Rancangan peraturan ini juga mengatur berbagai materi muatan lokal yang mencerminkan kekhasan daerah, di antaranya Pendidikan Adab dan Sopan Santun, Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, Bahasa Banjar, Tahfidz, Pendidikan Anti Korupsi, Kuliner Daerah, Seni dan Budaya Daerah, Pendidikan Anti Narkoba, Gaya Hidup Berkelanjutan, Literasi Keuangan, hingga English Skill Boost.

Melalui penyerahan hasil harmonisasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat segera menindaklanjuti ke tahap penetapan sehingga Kurikulum Muatan Lokal memiliki dasar hukum yang kuat dalam implementasinya di seluruh satuan pendidikan.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mewujudkan regulasi pendidikan yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



## Perkuat Integritas dan Kualitas Layanan, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Diseminasi Pedoman SPAK, SPKP, dan SKM Tahun 2026



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Diseminasi Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum, Rabu (25/02/2026) secara daring melalui Zoom Meeting.

Diseminasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan penyamaan persepsi terkait mekanisme pelaksanaan survei, penginputan data pada aplikasi, hingga strategi peningkatan nilai survei sebagai bagian dari penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Eldy Prasetya Setiawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“SPAK, SPKP, dan SKM menjadi instrumen penilaian, serta menjadi cerminan komitmen dalam membangun budaya kerja yang profesional. Hasil survei akan dijadikan bahan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Eldy.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan akan mengoptimalkan koordinasi lintas divisi dan kelompok kerja pelayanan publik agar pelaksanaan survei tahun 2026 berjalan tepat waktu, akuntabel, serta menghasilkan data yang valid dan kredibel.

Melalui partisipasi aktif dalam diseminasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan strategis kementerian, khususnya dalam penguatan integritas dan peningkatan kualitas layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang solid, diharapkan pelaksanaan SPAK, SPKP, dan SKM Tahun 2026 dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



## Perdalam Ketentuan Pidana dalam Perda, Kemenkum Kalsel Ikuti Pendalaman Materi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan



Banjarmasin, Humas\_Info – Dalam rangka meningkatkan kualitas perancangan produk hukum daerah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, bersama jajaran Tim Kerja Fasilitasi Perencanaan dan Pembentukan Regulasi di Wilayah mengikuti kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-Undangan secara daring pada Rabu (25/02/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah” yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dr. Dhahana Putra. Materi yang dipaparkan berfokus pada penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) pasca berlakunya Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa ketentuan pidana dalam Perda kini diarahkan untuk menyesuaikan dengan pola pemidanaan terbaru, khususnya terkait penghapusan pidana kurungan dan penyesuaian pidana denda. Sebagaimana tercantum dalam materi “Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca UU Penyesuaian Pidana”, Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai kategorisasi pidana denda yang terbagi dalam delapan kategori, mulai dari Kategori I sebesar Rp. 1.000.000,00 hingga Kategori VIII sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Namun khusus untuk Perda, batas maksimal ancaman pidana denda adalah Kategori III atau sebesar Rp 50.000.000,00. Selain itu, ketentuan pidana kurungan dalam Perda yang sebelumnya diatur, wajib dikonversi menjadi pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan norma pidana agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Keikutsertaan jajaran Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam memastikan setiap proses fasilitasi, harmonisasi, dan pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku serta selaras dengan kebijakan nasional.

Dengan adanya pendalaman materi ini, diharapkan para perancang peraturan perundang-undangan di wilayah semakin cermat dan adaptif dalam menyusun ketentuan pidana dalam Perda, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga implementatif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.



## Dukung Transparansi dan Akuntabilitas, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan secara virtual di Balai Pertemuan BerAKHLAK, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta Tim Kerja Pengelolaan Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Teknologi Informasi dan Layanan Pengaduan.

Sosialisasi dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, dan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Hantor Situmorang, yang memaparkan substansi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan tata kelola pengaduan guna mewujudkan sistem yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel. Pengelolaan laporan pengaduan harus dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, serta menjamin perlindungan terhadap pelapor.

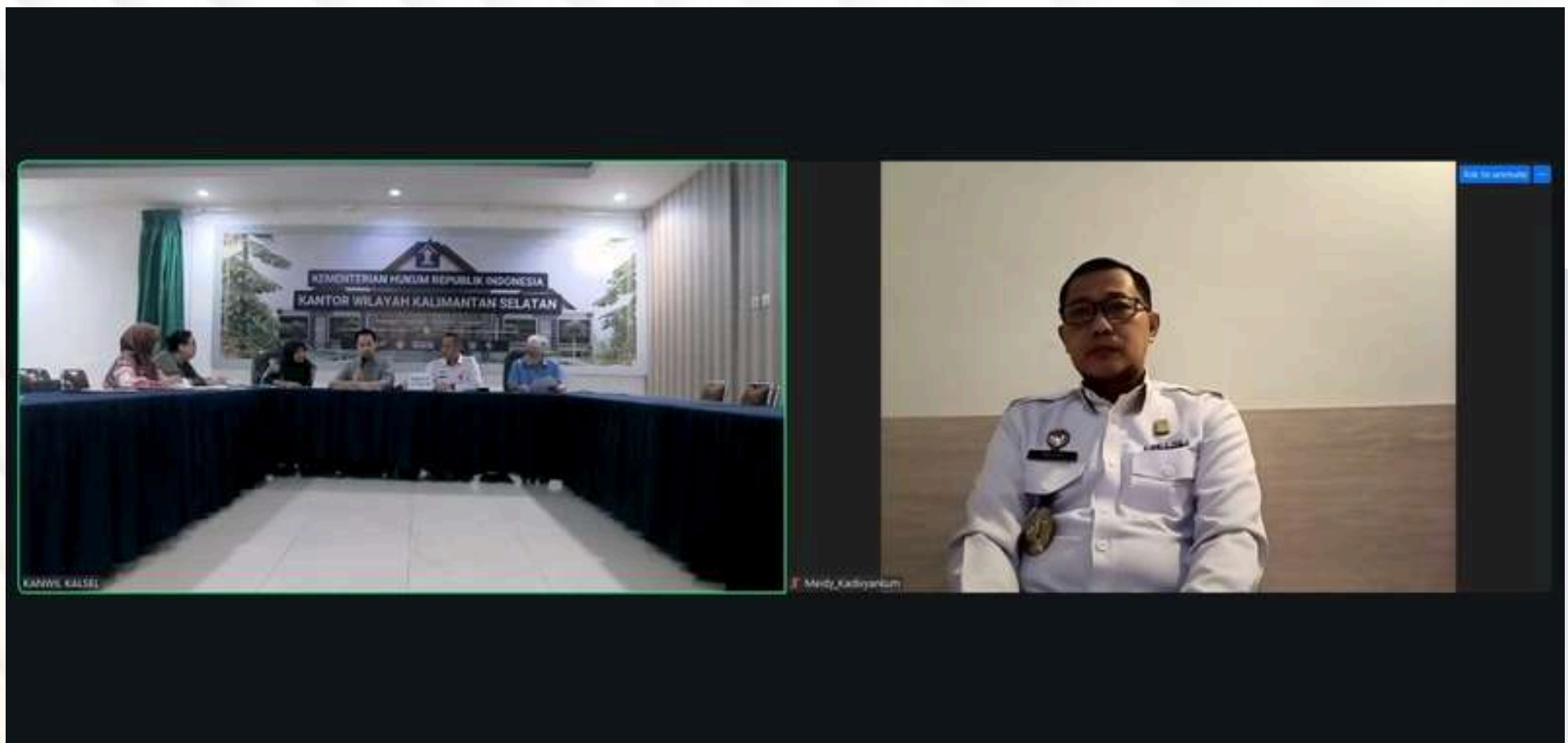
Selain itu, pengaduan masyarakat ditegaskan sebagai instrumen penting dalam deteksi dini potensi pelanggaran sekaligus sebagai sarana peningkatan kualitas layanan publik. Setiap satuan kerja diwajibkan memastikan mekanisme penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, dan pelaporan pengaduan berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatian utama dalam mendukung sistem pengaduan yang efektif, termasuk untuk monitoring dan evaluasi secara berkala. Penguatan koordinasi antara unit kerja, Inspektorat Jenderal, dan pihak terkait turut ditekankan, disertai penegasan batas waktu penanganan laporan serta kewajiban pelaporan hasil tindak lanjut secara berjenjang.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 secara optimal sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.



## Tingkatkan Kepatuhan Hukum Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Kalimantan Selatan Gelar Rapat Koordinasi



Banjarmasin, Humas\_Info – Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dalam rangka memperkuat peran MKN dalam pembinaan terhadap notaris, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Rapat koordinasi Majelis Kehormatan Notaris yang turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaga integritas dan profesionalisme notaris sekaligus memastikan setiap pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui rapat koordinasi ini, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendorong notaris untuk senantiasa menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatan.

Penguatan kepatuhan hukum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kenotariatan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.



## Arah Strategis KI 2026 Disosialisasikan, Kanwil Kemenkum Kalsel Siap Selaraskan Program Wilayah



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti Sosialisasi Arah Program Strategis Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara virtual, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kantor wilayah dan unit utama dalam rangka pemajuan KI di daerah, sekaligus memastikan keselarasan kebijakan pusat dengan pelaksanaan program kerja di wilayah. Sosialisasi diawali dengan laporan Sekretaris Direktorat Jenderal KI, dilanjutkan arahan Direktur Jenderal KI, serta penyampaian petunjuk pelaksanaan dan teknis oleh Bagian Program dan Pelaporan bersama unit kerja eselon terkait.

Dalam arahnya ditegaskan bahwa pelaksanaan Program Penyelenggaraan KI Tahun 2026 harus selaras (*in line*) antara kebijakan pusat dan implementasi di wilayah. Kantor wilayah diharapkan menindaklanjuti Rencana Aksi Program KI secara terukur dan akuntabel dengan menjadikan juklak dan juknis sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengoptimalkan pelaksanaan program KI di daerah.

“Kami berkomitmen untuk segera menginternalisasikan hasil sosialisasi ini kepada seluruh jajaran serta menyesuaikan rencana kerja dan target kinerja bidang KI agar selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan koordinasi dan perencanaan berbasis pedoman yang telah ditetapkan menjadi kunci dalam mendukung tercapainya sasaran strategis nasional di bidang Kekayaan Intelektual.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen dalam mendukung pelaksanaan Program KI Tahun 2026 secara optimal, terkoordinasi, dan akuntabel di wilayah Kalimantan Selatan.



## Asah Softskill, Peserta Pemagangan Nasional Tingkatkan Kompetensi melalui Program Maganghub Soft Skill Programme



Banjarmasin, Humas\_Info – Peserta program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan MagangHub Soft Skill Programme bertema "Emotional Intelligence" yang diselenggarakan pada Rabu (25/02/2026), oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia secara daring melalui kanal YouTube resmi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembinaan dan pengembangan kompetensi non-teknis bagi peserta magang nasional yang berada di berbagai instansi pemerintah. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta magang, khususnya dalam memahami, mengelola, dan mengoptimalkan kecerdasan emosional sebagai bekal penting dalam dunia kerja profesional.

Pada pelaksanaannya, para peserta program Pemagangan Nasional di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan ini secara daring dari masing-masing unit kerja dengan penuh antusias. Materi disampaikan oleh narasumber kompeten, Dr. Ir. Naufal Mahfudz, MBA, MM, selaku Chairman of Leadership and Executive IPB University, yang membahas peran kecerdasan emosional dalam kepemimpinan, kerja tim, serta pengambilan keputusan di lingkungan organisasi.

Melalui kegiatan ini, peserta magang diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pemahaman praktis mengenai pentingnya pengendalian emosi, empati, serta komunikasi yang efektif dalam mendukung kinerja dan etika kerja di instansi pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem mengapresiasi keikutsertaan Peserta Magang Nasional Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam MagangHub Soft Skill Programme ini yang mana mencerminkan wujud komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter, sejalan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

"Dengan adanya kegiatan pembekalan soft skill secara berkelanjutan, diharapkan peserta magang mampu mengimplementasikan nilai-nilai profesionalisme, integritas, serta kecerdasan emosional dalam setiap pelaksanaan tugas selama masa magang maupun di masa mendatang" ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi penunjang aktivitas bagi seluruh peserta selama menjalani masa Pemagangan Nasional guna memahami karakter diri dan upaya menggali potensi pada lingkungan profesional.



## Pembinaan Posbankum Yang Berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Kalsel Laksanakan Koordinasi Dengan Dinas PMD Tala



Pelaihari, Luhkum\_Info - Pada hari Rabu, 25 Februari 2026, Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah Laut (Tala), membahas terkait pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Desa/Kelurahan di Kab. Tala.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari program prioritas nasional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui penyediaan layanan bantuan hukum secara merata. Dalam kesempatan tersebut dibahas pentingnya dukungan perangkat desa/kelurahan agar keberadaan Posbankum dapat berjalan efektif sebagai sarana pemberdayaan hukum masyarakat dan peningkatan kompetensi masyarakat desa melalui pelatihan paralegal.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Febri Novarian menyampaikan rencana Kab. Tala terkait penyelenggaraan pendidikan paralegal khusus.

"Kami mendukung Posbankum, rencana pada triwulan ke-2 pelaksanaannya menggandeng LBH terakreditasi, hal ini merupakan komitmen dari Pemda Tala dalam bersinergi bersama Kemenkum dalam Pembinaan Hukum di Daerah," ucap Febri.

Selain itu, dalam kegiatan dibahas terkait dengan pelaporan layanan posbankum. Diharapkan Dinas PMD dapat bersama-sama dengan Kanwil Kemenkum Kalsel untuk mendorong Paralegal Desa untuk menggugah layanan posbankum pada tautan <https://app.posbankum.bphn.go.id/>. Hal ini juga merupakan bagian dari Pembinaan hukum di daerah yang berbasis data.



Kanwil Kemenkum Kalsel terus melaksanakan kegiatan pembinaan hukum di daerah yang berkelanjutan guna, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Pendampingan Langsung Pelaporan Layanan Posbankum di Desa Bumi Jaya Tanah Laut



Pelaihari, Luhkum\_Info – Tim Kerja Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pendampingan langsung pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada 25 Februari 2026.

Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum, Dianor, S. H., M. H., menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memberikan pemahaman kepada paralegal terkait dengan tugasnya didalam Posbankum.

"Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan bahwa layanan-layanan Posbankum yang telah diterima oleh masyarakat, dapat terdata dan dilaporkan dengan baik, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membuat Aplikasi yang mempermudah paralegal dalam proses pelaporan layanan Posbankum" ujar Dianor.

Lebih lanjut, ia berharap bahwa paralegal yang telah diberikan pendampingan, dapat berbagi pengetahuannya kepada paralegal yang lain khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Desa Bumi Jaya Mulyono, S.T., menyambut baik kedatangan Tim dari Kemenkum Kalsel.

"Kami menyambut baik dan sangat senang, karena layanan Posbankum di Desa kami sebenarnya sudah berjalan dan telah memberikan layanan kepada masyarakat, namun kami kebingungan terkait dengan tatacara pegisian laporannya, apalagi di desa sangat jarang sekali yang mahir di bidang digital," ungkap Mulyono.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan edukasi terkait dengan tata cara pelaporan atas layanan-layanan Posbankum melalui Aplikasi [app.posbankum.bphn.go.id](http://app.posbankum.bphn.go.id)., selain itu di jelaskan juga perihal dokumen atau data pendukung seperti dokumentasi dan surat perjanjian perdamaian (apabila layanan mediasi berhasil).

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada Posbankum dalam rangka mewujudkan pembinaan hukum di wilayah yang berkelanjutan.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Dampingi Bimtek Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Liberika Hatungun dan Lokpaikat



Tapin, KI\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali melaksanakan kegiatan Bantuan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat di Kabupaten Tapin, Rabu (25/2/2026). Kegiatan yang memasuki hari ketiga ini digelar di Gedung Bappelitbang Kabupaten Tapin sebagai kelanjutan dari rangkaian pendampingan intensif yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Bimtek ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas kunjungan lapangan ke sentra petani kopi Liberika di Kecamatan Hatungun dan Lokpaikat. Pendalaman tersebut bertujuan memperkuat data dukung serta substansi dokumen Indikasi Geografis, sehingga karakteristik dan keunikan kopi yang dihasilkan dapat teridentifikasi secara komprehensif.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin, Kepala Bidang Litbang Bappelitbang Kabupaten Tapin, Tim Ahli Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Camat Hatungun, serta para petani kopi dari Desa Hatungun dan Lokpaikat.

Pembukaan kegiatan disampaikan oleh Kepala Bidang Litbang Bappelitbang Kabupaten Tapin, Mahdiati, yang mengapresiasi pendampingan dari Tim Ahli Indikasi Geografis DJKI dan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan terima kasih atas komitmen bersama dalam mendorong pendaftaran Indikasi Geografis sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.

Selanjutnya, Tim Ahli Indikasi Geografis DJKI melakukan pemaparan dan review mendalam terhadap dokumen substantif. Pembahasan difokuskan pada karakteristik produk, faktor geografis, metode budidaya, hingga keterkaitan antara kualitas kopi dengan kondisi alam Hatungun dan Lokpaikat. Penguatan aspek tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan dokumen pendaftaran agar memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.

Camat Hatungun dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan harapan agar Kopi Liberika Hatungun dan Kopi Liberika Lokpaikat segera terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Menurutnya, pengakuan tersebut tidak hanya membanggakan Kabupaten Tapin, tetapi juga Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani.

Kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusias. Para petani aktif memberikan masukan terkait praktik budidaya, proses pasca panen, serta ciri khas rasa dan aroma kopi Liberika yang menjadi identitas wilayah mereka.

Melalui pendampingan berkelanjutan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan Kekayaan Intelektual komunal dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal di daerah.



## Sinergi dengan Ditjen AHU, Penguatan Layanan SKT Partai Politik di Kalsel Semakin Optimal



Banjarmasin, Humas\_Info – Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum terus diperkuat melalui kegiatan koordinasi dan penguatan layanan Badan Hukum Partai Politik yang dilaksanakan pada 25–27 Februari 2026 di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini menghadirkan tim dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan diskusi teknis dan penyamaan persepsi terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Partai Politik bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola layanan publik yang profesional dan akuntabel.

“Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan setiap proses layanan berjalan sesuai regulasi dan memberikan kepastian hukum. Dengan koordinasi yang baik, kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan administrasi partai politik, akan semakin optimal,” ujar Alex.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa penguatan pemahaman teknis menjadi kunci dalam menjaga konsistensi pelaksanaan layanan di daerah.

“Melalui koordinasi ini, kami semakin memantapkan prosedur dan standar layanan agar pelaksanaan penerbitan SKT Partai Politik berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Meidy.

Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat koordinasi lintas instansi di daerah, sehingga pelaksanaan layanan administrasi hukum umum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kalimantan Selatan.



## Kemenkum Kalsel Perkuat Koordinasi Pengesahan Badan Hukum Partai Politik bersama Bakesbangpol Provinsi Kalsel



Banjarbaru, AHU\_Info – Dalam rangka memperkuat tata kelola layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya terkait verifikasi dan pembentukan badan hukum partai politik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) bersama Tim Direktorat Tata Negara Ditjen AHU melaksanakan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (26/02).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Kepala Bidang Pelayanan AHU Dewi Woro Lestari, serta Kepala Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik Direktorat Tata Negara. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan dialogis dengan fokus pada penyamaan persepsi layanan verifikasi partai politik, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun prosedur dalam pelaksanaan verifikasi di daerah.

Selain itu, dibahas pula mekanisme penerbitan Surat Keterangan Keberadaan oleh Bakesbangpol sebagai dokumen pendukung dalam proses permohonan pengesahan badan hukum partai politik. Validitas data, ketelitian administratif, serta kepastian prosedural menjadi perhatian utama dalam mendukung tertib administrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Direktorat Tata Negara juga menegaskan kembali substansi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 sebagai landasan normatif proses pendirian dan pengesahan badan hukum partai politik. Regulasi ini mengatur antara lain kewajiban pemenuhan kepengurusan paling sedikit 75% kabupaten/kota dalam satu provinsi serta sekurang-kurangnya 50% kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pertemuan turut membahas indikasi dualisme pendaftaran partai politik di wilayah Kalimantan Selatan. Para pihak sepakat untuk melakukan telaah bersama terhadap keabsahan dan legalitas dokumen yang diajukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas, objektivitas, dan kepastian hukum.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kemenkum dan Bakesbangpol dalam menjamin proses verifikasi serta pembentukan badan hukum partai politik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik serta meminimalisir potensi permasalahan administratif di daerah.

Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi, serta menjaga integritas layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kalimantan Selatan.



## Tingginya Minat WNA dan Anak Perkawinan Campuran Jadi WNI, Tegaskan Berharganya Kewarganegaraan Indonesia



Jakarta - Status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) bukan sekadar identitas administratif, melainkan kehormatan dan komitmen kebangsaan yang diperoleh melalui proses yang ketat dan selektif. Setiap tahun, pemerintah menerima berbagai permohonan pewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menetap dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Namun demikian, proses untuk menjadi WNI tidaklah mudah, karena harus melalui berbagai persyaratan dan pertimbangan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat, bahwa tidak semua permohonan pewarganegaraan dapat dikabulkan. Berdasarkan data permohonan pewarganegaraan Direktorat Tata Negara, sejak tahun 2020 hingga 2025, dari total 544 pengajuan pewarganegaraan, hanya 241 permohonan yang diterima. Bahkan, dalam satu tahun terakhir (2025), dari 147 permohonan naturalisasi, hanya 2 yang diterima, sementara 145 permohonan ditolak atau belum dapat dikabulkan.

Direktur Jenderal (Dirjen) AHU, Widodo, menilai angka tersebut menegaskan bahwa proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia dilakukan secara selektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang ketat. Setiap permohonan harus memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk aspek integrasi kebangsaan, kepatuhan hukum, serta kontribusi terhadap negara.

"Setiap tahun, kami menerima berbagai permohonan pewarganegaraan dari WNA yang ingin menetap dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, penerimaan dilakukan dengan pertimbangan yang ketat, menunjukkan bahwa status kewarganegaraan Indonesia merupakan sesuatu yang berharga dan tidak diberikan secara otomatis," ujar Dirjen AHU, saat Konferensi Persi di Gedung Ditjen AHU, Jakarta, Kamis (26/02/2026).

Selain permohonan pewarganegaraan oleh WNA, permohonan kewarganegaraan juga banyak diajukan oleh anak hasil perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Tingginya jumlah permohonan dari kelompok ini menunjukkan bahwa banyak anak dari keluarga campuran memilih untuk menjadi WNI dibandingkan mempertahankan kewarganegaraan asingnya.

Mengutip data pada laman Instagram Kemenkum, sejak Oktober 2024 hingga Januari 2026, sebanyak 212 ABG telah memperoleh Surat Keputusan (SK) WNI. Tahun 2025 menjadi periode dengan jumlah penetapan tertinggi.

"Penetapan SK WNI bagi ABG adalah bentuk perlindungan negara, kepastian hukum, dan investasi masa depan anak. Semakin tinggi permohonan menandakan semakin banyak keluarga yang memastikan status kewarganegaraan anak secara resmi dan sah," tutur Dirjen AHU.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, anak hasil perkawinan campuran diberikan kesempatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut atau paling lambat sebelum usia 21 tahun, mereka wajib menyatakan pilihan kewarganegaraannya. Pilihan untuk menjadi WNI menjadi bukti kuat bahwa Indonesia tetap menjadi identitas dan rumah bagi mereka yang memiliki latar belakang keluarga lintas negara.

"Anak-anak hasil perkawinan campuran memiliki kesempatan untuk memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun. Banyak di antara mereka yang dengan sadar memilih menjadi WNI. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi pilihan utama bagi generasi muda dari keluarga campuran," tambahnya.

Tingginya minat WNA maupun anak hasil perkawinan campuran untuk menjadi WNI, lanjut Dirjen AHU, merupakan indikator kepercayaan terhadap Indonesia. Banyaknya anak hasil perkawinan campuran yang memilih kewarganegaraan Indonesia menunjukkan kuatnya keterikatan mereka dengan bangsa Indonesia.

"Pemerintah melalui Direktorat Jenderal AHU akan terus memastikan bahwa setiap proses pewarganegaraan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga status sebagai warga negara Indonesia tetap memiliki makna yang penting dan bernilai tinggi," tutup Dirjen AHU.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa tingginya minat WNA maupun anak hasil perkawinan campuran untuk menjadi WNI merupakan bukti nyata bahwa kewarganegaraan Indonesia memiliki nilai strategis dan kehormatan tersendiri. Menurutnya, data selektivitas yang disampaikan Ditjen AHU menunjukkan bahwa negara benar-benar menjaga marwah status kewarganegaraan melalui proses yang ketat dan terukur.

"Angka permohonan yang tinggi namun disertai tingkat seleksi yang ketat menegaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia bukan sekadar status administratif, melainkan bentuk komitmen kebangsaan yang harus dipenuhi dengan persyaratan hukum yang jelas. Hal ini sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap Indonesia sebagai rumah bersama," ujar Alex Cosmas Pinem. Ia menambahkan, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan layanan kewarganegaraan yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Kemenkum Kalsel Ikuti Dialog Program Penyelenggaraan Pemagangan Nasional Secara Virtual



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti Dialog Program Penyelenggaraan Pemagangan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia secara virtual pada Jumat (27/02/2026). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka selaku mentor pemagangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Zoom Meeting.

Dialog tersebut merupakan bagian dari upaya penyalarsan kebijakan serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program Pemagangan Nasional.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, menyampaikan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung implementasi kebijakan pusat sekaligus memastikan program Pemagangan Nasional berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui dialog ini diharapkan hasil pemagangan dapat tercapai secara optimal, serta tercipta standar pelaksanaan pemagangan yang lebih terstruktur dan efektif.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

**#** bangga  
melayani  
bangsa



Terhubung lebih dekat: [YouTube](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [Twitter](#) [KEMENKUMKALSEL](#)